

ISLAM DAN PEMBANGUNAN MANUSIA DI ERA GLOBALISASI

As'ad Bukhari

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

smash_azza@gmail.com

Abstrak

Era globalisasi membuat manusia semakin terus bersaing dan meningkatkan kemampuan untuk dapat menjadi manusia yang produktif. Pembangunan manusia merupakan hal utama dalam melakukan perubahan serta kemajuan dalam kehidupan. Dalam pembahasan Pembangunan manusia di era globalisasi yang merupakan program dunia melalui persatuan bangsa-bangsa tidak terlepas dari kajian Islam. Sehingga Islam sebagai agama dapat masuk untuk menjadi pembahasan yang sangat penting dalam isu-isu pembangunan tentunya. Pembangunan nasional menjadi tugas utama pemerintah dari tingkat daerah sampai provinsi, sehingga mempersiapkan sumberdaya manusia sebagai bentuk peggerak dan pengelolanya. Kebijakan terhadap pembangunan sumberdaya manusia selalu mengalami dinamika dan perkembangannya dari segi sosiologi, antropologi dan budaya.

Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia menjadi penentu dan memiliki pengaruh besar terhadap isu pembangunan secara nasional. Islam dan pembangunan manusia di era globalisasi menjadi hal terpenting untuk membangun Indonesia menjadi negara yang berbudaya, berkarakter dan berkemajuan. Dengan demikian proses pembangunan menjadi bagian utama untuk merekonstruksi infrastruktur, manusia, jaringan dan setiap aspeknya. Konstruksi dalam pemikiran agama yakni pemikiran studi Islam dalam proses pembangunan menjadi tujuan agar tercapatnya pembangunan di era globalisasi. Hal tersebut juga sebagai bentuk memajukan masyarakat dan pola pikir manusia yang melek digital serta sadar akan ilmu pengetahuan, teknologi, pembangunan dan kehidupan di era globalisasi dalam bentuk hubungan internasional.

Kata Kunci : *Konstruksi Studi Islam; Manusia; Globalisasi*

A. Pendahuluan

Di era globalisasi ini yang sering disebut era modernisasi ini sangat diperlukan Sumberdaya manusia yang sangat memadai untuk perkembangan dikalangan masyarakat Indonesia yang masih jauh dari harapan pemerintah sebagai pengatur tatanan pemerintah maupun tatanan masyarakatnya yang bertujuan untuk memakmurkan dan mensejahterakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Standar pembangunan manusia yang menjadi kesepakatan antara lain berhak untuk bisa membaca dan menulis, untuk hidup sehat, untuk bisa mendapatkan penghasilan yang layak, untuk mendapat rumah yang memadai, dan untuk hidup sebagai satu bangsa dengan damai dan aman. Diharapkan dengan desentralisasi atau yang lebih populer disebut otonomi daerah dapat memotivasi daerah-daerah tingkat propinsi maupun kabupaten/kota untuk lebih memprioritaskan mengurangi kemiskinan dan mempersiapkan diri dalam sumberdaya manusia yang handal.

Paradigma pembangunan manusia melihat bahwa usaha peningkatan kualitas manusia memiliki nilai intrinsik, dalam arti, sebagai tujuan pada dirinya sendiri. Prespektif ini berbeda dengan pembangunan sumberdaya manusia, yang menempatkan manusia sebagai sumber atau input pembangunan dan melihat kualitas manusia sebagai sarana (*means*) untuk menghasilkan pendapatan. Sebagai paradigma pembangunan yang holistik, pembangunan manusia memandang program pembangunan yang dirancang, seharusnya bercirikan "*for and by people*". Maksud dari ciri-ciri ini adalah sebagai berikut: *pertama*, tentang penduduk (*of people*), yakni pemberdayaan penduduk yang diupayakan melalui investasi bidang-bidang pendidikan kesehatan, dan pelayanan sosial dasar lainnya; *kedua*, untuk penduduk (*for people*), yakni pemberdayaan penduduk yang diupayakan melalui penciptaan peluang kerja dan perluasan peluang berusaha (dengan cara memperluas kegiatan ekonomi suatu wilayah); *ketiga*, oleh penduduk (*by people*), yakni pemberdayaan penduduk yang dapat meningkatkan harkat dan martabat melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan di segala bidang. Dalam hal ini berarti menyangkut tentang pengambilan keputusan dalam proses pembangunan.¹

¹ Badruddin, Syamsiah, *Teori dan Indikator Pembangunan* (Jakarta: Yayasan Obor, 2009), 45-50.

Keberhasilan masa depan suatu daerah di era globalisasi terletak pada pengelolaan produktifitas, perusahaan perubahan-perubahan dan pengelolaan pembangunan kerja secara cepat. Masyarakat tergantung pada spesialisasi dari berbagai spesifik untuk menyediakan *output* dan *input* yang dihasilkan maupun yang didapat supaya menghindari pengangguran berstruktur, sehingga menaikkan kualitas taraf hidup subjek atau masyarakat sekaligus mengurangi angka pengangguran disuatu daerah. Demi mencapai kehidupan yang lebih baik diperlukan proses sosial antara pemerintah dan masyarakatnya demi mencapai keselarasan dan keseimbangan antara tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah maupun tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat.

Apapun komponen spesifik atas kehidupan yang lebih baik itu, pembangunan di semua masyarakat paling tidak memiliki tiga tujuan inti yaitu peningkatan ketersediaan kebutuhan pokok, peningkatan standar hidup, dan perluasan pilihan ekonomis dan sosial setiap individu. Adanya kemiskinan di dalam suatu wilayah merupakan potret bahwa pembangunan itu secara umum kurang berhasil sehingga pada dasarnya keberhasilan pembangunan suatu wilayah tergantung pada kegiatan pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya. Globalisasi selalu berkaitan dengan perekonomian yang melibatkan hubungan-hubungan global.

Sesungguhnya globalisasi bukan hanya sebatas tentang kesalingtergantungan terhadap ekonomi saja, akan tetapi terletak pada persoalan transformasi waktu dan ruang dalam kehidupan manusia. Globalisasi dapat mempengaruhi masyarakat secara langsung dan segera dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Hal ini tidak lepas dari jasa revolusi komunikasi dan penyebaran teknologi informasi yang semakin cepat, canggih dan modern.²

Indeks pembangunan manusia merupakan cara sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.³ Pembangunan manusia, dalam terminologi pembangunan di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru.

²Anthony Giddens, *The Third Way, Jalan Ketiga: Pembaharuan Demokrasi Sosial* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 35.

³Davies, A. and G. Quinlivan, *A Panel Data Analysis of the Impact of Trade on Human Development* (Journal of Socioeconomics, 2006), 25.

Dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan maupun retorika politik pembangunan, hal tersebut sering dijumpai dalam berbagai kesempatan. Namun demikian, selama enam repelita, pembangunan manusia kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Kini, setelah derasnya arus reformasi dan tuntutan krisis tak lagi dapat terbendung, banyak orang kembali mengangkat isu tentang hakekat pembangunan yang selama ini dilaksanakan, yang konon tidak terpusat pada manusia sebagaimana dikehendaki oleh paradigma baru pembangunan manusia.

B. Perumusan Masalah

Globalisasi menuntut adanya persaingan yang sangat ketat di berbagai setiap bidangnya dan persaingan itu tidak lepas dari semua unsur kebutuhan ummat manusia yang terus maju serta berkembang. Sehingga perlu adanya upaya reformasi untuk melakukan sebuah perubahan yang dapat menjawab segala tantangan di era globalisasi. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor kunci dan hal utama untuk melakukan perubahan, tentu ini menjadi persoalan bagi ajaran Islam yang juga memandangnya. Pembangunan manusia tidak hanya merupakan tugas pemerintah, institusi pendidikan, dan lembaga-lembaga terkait lainnya, namun Islam juga memandang dengan perspektif sekaligus pendekatan nilai normatif dan historis untuk menginterpretasikannya. Perlu adanya penafsiran kontekstual untuk memahami adanya strategi dan upaya pembangunan manusia di era globalisasi, dan sebagai bentuk modernasi ummat Islam dalam menyikapi persoalan pembangunan manusia tersebut.

Upaya-upaya peningkatan kualitas penduduk sebagai sumber daya manusia dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu pendidikan, kesehatan, kesejahteraan ekonomi maupun aspek non fisik dalam hal ini agama dan budaya. Bagaimanakah pengaruh Islam dan Pembangunan Manusia di Era Globalisasi ?

C. Definisi Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia, menurut UNDP, didefinisikan sebagai suatu proses yang ditujukan untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk (*people*). Dalam konsep ini, penduduk (manusia) sebagai tujuan akhir (*the ultimate end*) dan upaya pembangunan itu sendiri sebagai sarana utama (*principle means*) dalam rangka mencapai tujuan itu. Untuk menjamin tercapainya tujuan tersebut, empat hal pokok yang perlu diperhatikan, yaitu: produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan. Keempat hal ini, saling terkait, dan menjadi penentu dalam perumusan kebijakan pembangunan manusia (dalam arti yang luas).

Konsep pembangunan manusia dalam pengertian di atas jauh lebih luas dibandingkan dengan teori-teori pembangunan ekonomi yang konvensional termasuk model pertumbuhan ekonomi, pembangunan sumberdaya manusia (SDM), pendekatan kesejahteraan, dan pendekatan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Model pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan pendapatan dan produksi nasional (GNP). Pembangunan SDM menempatkan manusia terutama sebagai input dari proses produksi (sebagai suatu sarana bukan tujuan). Pendekatan kesejahteraan melihat manusia sebagai pemanfaat (*beneficiaries*) bukan sebagai agen perubahan dalam pembangunan. Pendekatan kebutuhan dasar memfokuskan pada penyediaan barang dan jasa kebutuhan hidup.⁴

Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Menurut Siagian, ia memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

⁴ T. Moeljarto, *Politik Pembangunan : Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1995), 15-23.

Sedangkan menurut Ginanjar Kartasasmita memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti bahwa pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi sebagai akibat adanya pembangunan. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan atau perluasan (*expansion*) atau peningkatan (*improvement*) dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat.⁵

Sementara itu, terdapat referensi lain yang menggagas konsep dan indeks pembangunan manusia dari perspektif berbeda. Salah satunya dikemukakan oleh Stiglitz, Sen, dan Fitoussi, yang mengukur pembangunan manusia berdasarkan kesehatan, pendidikan, keamanan dari segi ekonomi, keseimbangan waktu, partisipasi politik dan pemerintahan, hubungan sosial, kondisi lingkungan, keamanan pribadi, dan tingkat kualitas kehidupan. Disisi lain, dalam penelitian yang dilakukan oleh Alkire, konsep pembangunan manusia diterangkan sebagai berikut:

- 1) Pembangunan manusia ditujukan untuk memperbesar kebebasan individu dalam melakukan dan menjadi sesuatu yang menurut mereka bernilai. Secara prinsip, pembangunan manusia semestinya memberdayakan manusia, atau dengan kata lain, pembangunan manusia semestinya menjadikan manusia sebagai fokus utama.
- 2) Pembangunan manusia mencakup kebebasan dasar yang berkaitan dengan kehidupan manusia, dan ini berlaku untuk semua Negara.
- 3) Pembangunan manusia merupakan pembangunan yang dilakukan oleh manusia, berkaitan dengan manusia, dan ditujukan untuk manusia. Dengan demikian tidak mengenal apakah manusia tersebut miskin atau kaya, serta bertindak selaku orang pribadi atau sebagai anggota komunitas masyarakat. Intinya, manusia-lah yang menjadi pemeran utama.

⁵ Nasution, Zulkarimen, *Komunikasi Pembangunan : Pengenalan Teori dan Penerapannya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 45-57.

Untuk mengukur tingkat pembangunan manusia ditetapkan skala prioritas tertentu, antara lain memasukkan faktor pengentasan kemiskinan, keadilan, efisiensi, partisipasi, kesinambungan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pembangunan manusia bersifat multidimensional dan setiap komponen didalamnya memiliki keterkaitan. Oleh karenanya diperlukan sudut pandang yang menyeluruh (*holistic*) dalam memahaminya.

Paradigma pembangunan di Indonesia mengalami perkembangan dari beberapa tahap sebagai berikut: *pertama*, paradigma pertumbuhan (*growth paradigm*); *kedua*, pergeseran dari paradigma pertumbuhan menjadi paradigma kesejahteraan (*welfare paradigm*); dan *ketiga*, paradigma pembangunan yang berpusat ada manusia (*people centered development paradigm*). Menurut Owens (1987) yang dikutip oleh Martinus Nanang, hal terpenting adalah pembangunan manusia dan bukan pembangunan benda (*the development of people rather than the development of things*), karena nilai balik riil pembangunan manusia memberikan sumbangan lebih daripada pembangunan dibandingkan pada pembangunan benda (*fisik*). Dalam UNDP (*United Nations Development Programme*), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (*a process of enlarging people's choices*). Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya.

D. Studi Islam Terhadap Pembangunan Manusia

Era globalisasi merupakan suatu akibat revolusi yang terjadi pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak terbandung, sehingga menimbulkan dampak positif dan negatif di dalam masyarakat. Terutama terhadap masyarakat yang sedang berkembang, sehingga dalam berbagai ilmu sosial kemasyarakatan terdapat menimbulkan banyak pemikiran-pemikiran baru termasuk dalam hal keislaman. Suatu penilaian ataupun evaluasi terhadap pemahaman keagamaan khususnya keislaman sangat penting untuk melihat kondisi manusia di era globalisasi.

Dalam hal ini, pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi menurut Nugroho dan Rochmin Dahuri arti pembangunan adalah:

Pertama, adalah terciptanya alternatif yang lebih banyak secara sah. Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan hendaknya berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek kehidupan. Ada pun mekanismenya menuntut kepada terciptanya kelembagaan dan hukum yang terpercaya yang mampu berperan secara efisien, transparan, dan adil.

Kedua, untuk mencapai aspirasi yang paling manusiawi, yang berarti pembangunan harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika umat. Kaum intelektual muslim menerima cita-cita dan ideologi nasional dan memanfaatkannya untuk melegitimasi kegiatan mereka, yang tujuan sebenarnya adalah menyebarkan cita-cita Islam. Cita-cita nasional pembangunan ekonomi diterima oleh kaum intelektual muslim dan ditransformasikan menjadi tugas Islam baik melalui jihad atau teologi pembebasan. Kaum intelektual muslim menyatakan bahwa Islam mempunyai suara yang harus dihormati dalam urusan-urusan selain perkara keagamaan semata.⁶

Khususnya dua sila dari pancasila, yakni keadilan sosial dan demokrasi (permusyawaratan), menjadi bagian penting. Adanya reorientasi kebijakan dan strategi pembangunan, di pusat dan daerah, yang lebih terpusat. Pembangunan manusia menjadi program yang selalu ada untuk diimplementasikan demi menyiapkan kualitas manusia yang baik untuk mengisi sektor-sektor yang dapat menguntungkan lagi menghasilkan. Hal ini tentu harus direncanakan dan dipersiapkan secara matang dan *sustainable* atau berkelanjutan, sehingga dapat mencapai pada hasil serta tujuan yang telah diperhitungkan. Hal itu didukung oleh kenyataan bahwa keduanya adalah konsep-konsep Islam yang penting. Pembangunan adalah suatu kewajiban agama. Bukan hanya aspek-aspek tertentu agama Islam saja yang diajarkan, tetapi mereka juga terkait oleh keharusan untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

⁶ Sukma, "Islam Pembangunan", www.wordpress.com, diakses 03 Mei 2018.

Lembaga-lembaga keagamaan mempunyai tugas yang penting untuk bekerja demi pembangunan manusia. Islam merupakan pemersatu kebanyakan masyarakat Indonesia, pengembangan masyarakat tidak dapat di pisahkan dari program pendidikan Islam karena kegiatan pengembangan masyarakat adalah perwujudan dari konsep kewajiban manusia mengabdikan kepada Allah.

Pilar pembangunan manusia adalah *istishlah* atau kebaikan atau kemaslahatan bagi manusia. Al-Qur'an secara eksplisit menjelaskan akan larangan untuk membuat kerusakan di muka bumi, sehingga setiap kebijakan yang diputuskan oleh manusia harus memperhatikan pilar ini. Pelaksanaan pilar bangunan ini hanya memberikan dua rambu yaitu halal dan haram yang masing-masing memiliki konsekuensi yaitu pahala atau dosa.

Jika semua kebijakan terhadap pembangunan manusia membawa kebaikan bagi kualitas hidup manusia maka hal tersebut halal dilakukan dan mereka berhak mendapatkan pahala karena telah menjalankan ketaatan terhadap perintah Allah Swt sedangkan sebaliknya jika mereka membuat kebijakan yang dapat merusak kualitas hidup manusia maka hal tersebut haram dari sisi aturan dan dosa jika tetap dilakukan.

Pada akhirnya, pembangunan kualitas manusia dengan menitikberatkan pada pembangunan keilmuan dan keimanan mampu menghasilkan generasi baru yang cerdas berilmu dan berkemajuan dan memiliki spirit keimanan dan tauhid kepada Allah Swt. Sehingga Islam hadir pada setiap pola pikir masyarakat, pada setiap pengambilan keputusan, serta pada segenap lini kehidupan di masyarakat. Implikasi lebih jauh dari hal tersebut adalah terciptanya lingkungan serta kehidupan sosial-masyarakat yang baik dan beradab.

Kemampuan kejiwaan merupakan sumber daya insani (sumberdaya manusia) yang dimiliki oleh manusia. Dengan seperangkat organ tubuh yang diberikan oleh Allah Swt kepada manusia, manusia mempunyai daya atau potensi (kekuatan) yang apabila dikembangkan akan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, dan akan menjadikan manusia yang sadar akan tanggung jawabnya baik tanggung jawabnya sebagai hamba Allah Swt dan sebagai khalifah Allah Swt. Manusia mempunyai sumber daya yang meliputi daya tubuh, daya hidup, dan daya akal.

Apabila keempat daya tersebut dikembangkan, maka akan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dalam artian beriman, bertaqwa, berbudi pekerti luhur dan mampu menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah Swt dan sebagai khalifah Allah Swt.

Sebagaimana dalam hadits Rasulullah, beliau bersabda : *“Sesungguhnya bekerja mencari rezeki yang halal itu merupakan kewajiban setelah ibadah fardhu”*. (HR. Tabrani dan Baihaqi). Dalam Islam digunakan istilah kerja keras, kemandirian (*biyadilu*) dan tidak cengeng. Setidaknya terdapat beberapa ayat al-Qur'an maupun hadis yang dapat menjadi rujukan pesan tentang semangat kerja keras dan kemandirian ini, seperti: *“Amal yang paling baik adalah pekerjaan yang dilakukan dengan cucuran keringatnya sendiri”* (HR. Abu Dawud).

Islam memandang bahwa bekerja merupakan suatu kewajiban bagi setiap insan. Karena dengan bekerja seseorang akan memperoleh penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan juga keluarganya serta dapat memberikan maslahat bagi masyarakat disekitarnya. Islam juga mengajarkan bahwa pekerjaan harus dilaksanakan oleh orang yang mengetahuinya dengan ilmu atau dengan ilmu atau dengan kata lain pekerjaan harus dikerjakan oleh orang yang ahli dibidangnya. Hal ini ditegaskan dalam al-Qur'an dalam firman-Nya :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya : *“...dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya”*. [QS: al-Isra'(17) : 36].

Allah mengingatkan manusia agar mencegah keburukan dengan tidak berucap apa yang tidak diketahui, jangan mengaku tahu apa yang engkau tidak ketahui, jangan mengaku tahu apa yang engkau tidak ketahui, termasuk dalam hal ini mengaku punya pengetahuan atau kompetensi di suatu bidang padahal dia tidak memilikinya. Ayat ini menuntun manusia jika bekerja menggunakan pendengaran, penglihatan dan hati sebagai alat-alat untuk meraih pengetahuan. Pembahasan dalam Islam sosok manusia terdiri dua potensi yang harus dibangun, yaitu lahiriah sebagai tubuh itu sendiri dan ruhaniyah sebagai pengendali tubuh. Pembangunan manusia dalam Islam tentunya harus memperhatikan kedua potensi ini.

Jika dilihat dari tujuan pembangunan manusia Indonesia yaitu menjadikan manusia seutuhnya, maka tujuan tersebut harus memperhatikan kedua potensi yang ada pada manusia. Islam memandang tinggi masalah sumberdaya manusia ini khususnya yang berkaitan dengan akhlak (sikap, pribadi, etika dan moral). Kualitas sumberdaya manusia menyangkut banyak aspek, yaitu aspek sikap mental, perilaku, aspek kemampuan, aspek intelegensi, aspek agama, aspek hukum, aspek kesehatan dan sebagainya. Tidak dapat dipungkiri bahwa aspek jasmaniah selalu ditentukan oleh ruhaniah yang bertindak sebagai pendorong dari dalam diri manusia. Untuk mencapai sumberdaya manusia berkualitas, usaha yang paling utama sebenarnya adalah memperbaiki potensi dari dalam manusia itu sendiri, hal ini dapat diambil contoh seperti kepatuhan masyarakat terhadap hukum ditentukan oleh aspek ruhaniah ini.

E. Analisis Terhadap Islam dan Pembangunan Manusia di Indonesia

Saat ini dunia memang sedang berada di tengah globalisasi, yaitu suatu era yang melahirkan saling ketergantungan antara negara satu dengan negara yang lainnya, sehingga menuntut adanya kerjasama yang erat untuk membangun kehidupan masing-masing negara. Globalisasi juga telah merubah peran dan fungsi negara dengan menyesuaikan realitas baru yang muncul di dunia, hal ini dikarenakan globalisasi akan berjalan dengan baik bila negara tetap berperan aktif didalamnya dan disesuaikan dengan realitas baru yang muncul di dunia. Ini menandakan bahwa globalisasi tidak menghapuskan peran negara karena adanya manfaat globalisasi yang hanya dapat dinikmati oleh masyarakat apabila negara ikut berperan aktif didalamnya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Eksklusi perempuan, etnis minoritas, dan orang-orang yang tinggal di daerah terpencil menghambat kemajuan pembangunan manusia. Hal ini telah menyebabkan kesenjangan yang signifikan dan menyebabkan banyak ketertinggalan di dunia, termasuk di Indonesia dan kawasan Asia dan Pasifik. Selain itu, kelompok yang termarginalisasi sering memiliki kesempatan terbatas untuk mempengaruhi lembaga dan kebijakan yang menentukan hidup mereka. Ini adalah salah satu temuan kunci yang dilakukan oleh United Nations Development Programme (UNDP).

Pembangunan manusia untuk semua aspek mengadvokasikan fokus yang lebih besar pada kelompok teresklusikan, dan tindakan untuk mengatasi hambatan inklusi sangat diperlukan untuk memastikan pembangunan manusia berkelanjutan untuk semua orang. Menurut Selim Jahan, jangan terlalu berfokus pada rata-rata nasional, yang sering menutupi variasi yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Untuk maju perlu meneliti lebih dekat bukan hanya apa yang telah dicapai, tetapi siapa yang telah tertinggal dan mengapa bisa terjadi. Dalam analisisnya tersebut, menunjukkan bahwa kemajuan belum memberi manfaat bagi semua orang dan kesenjangan berdampak pada kelompok tertentu secara tidak proporsional. Terutama perempuan, etnis minoritas dan orang-orang yang tinggal di daerah terpencil dapat mengalami deprivasi secara terbuka dan tersembunyi. Di Indonesia, meskipun terjadi penurunan kemiskinan secara tajam dalam dua dekade terakhir, 140 juta warga masih hidup dengan kurang dari Rp. 20.000 per hari.⁷

Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (IPM) untuk 2015 adalah 0.689. Ini menempatkan Indonesia dalam kategori pembangunan manusia menengah, dan peringkat 113 dari 188 negara dan wilayah. Nilai IPM meningkat 30,5 persen dari nilai pada tahun 1990. Hal ini mencerminkan kemajuan yang telah dicapai Indonesia dalam hal harapan hidup saat lahir, rata-rata tahun bersekolah, harapan lama bersekolah dan pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita selama periode tersebut. Menurut Christophe Bahuét, menunjukkan bahwa setelah begitu banyak kemajuan yang dicapai oleh Indonesia, langkah selanjutnya menuju pembangunan manusia yang tinggi adalah inklusi dan pengurangan kesenjangan, khususnya untuk provinsi terpencil dan antara laki-laki dan perempuan.⁸

⁷ Badan Pusat Statistik (BPS), “Statistik Tahunan”, Berbagai Tahun Penerbitan diakses Pada 27 Mei 2018.

⁸ Isabel Dunstan, “Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Meningkat tapi Kesenjangan Masih Tetap Ada”, diakses 24 Mei 2018.

Perkembangan globalisasi membawa dampak yang teramat luas, baik dampak positif maupun dampak negatif. Kualitas masyarakat yang baik sangat dibutuhkan untuk dapat bertahan dan turut mengendalikan perkembangan global ke arah yang baik. Masyarakat yang berkualitas tinggi ditunjukkan dengan kemampuan berliterasi sains yang baik meliputi kemampuan berpikir kreatif, menganalisis masalah, mengambil keputusan, bersikap dan menyelesaikan masalah. Namun, untuk membendung dampak negatif perkembangan global tidak cukup dengan kemampuan literasi sains tetapi juga butuh kemampuan literasi Islam yang baik. kemampuan berliterasi islam yang baik sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Swt meliputi pemahaman nilai-nilai tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Keseimbangan dalam pembangunan manusia berdasarkan kedua ranah ini merupakan aspek penting untuk menghasilkan manusia Indonesia yang beradab, berkepribadian dan berkemajuan.

F. Penutup

Pembangunan manusia memiliki dimensi yang sangat luas dan cenderung kompleks. Simplifikasi dari kompleksitas ini, diwujudkan dengan menampilkan sumberdaya manusia dan pembangunan manusia sebagai ukuran pembangunan yang komprehensif, yang akan dioptimumkan pemanfaatannya dalam evaluasi pembangunan, alat advokasi, maupun perumusan kebijakan perencanaan pembangunan. Kebijakan pembangunan pada masa mendatang akan sangat dipengaruhi oleh paradigma pembangunan manusia yang saat ini sedang berkembang, sejalan dengan berkembangnya tuntutan reformasi dan situasi krisis.

Kebijakan pembangunan manusia yang responsif, harus memperhatikan 4 hal pokok, yaitu peningkatan produktivitas penduduk, pemerataan kesempatan untuk setiap penduduk, kesinambungan untuk generasi mendatang, dan pemberdayaan masyarakat partisipasi aktif masyarakat sipil juga sangat diperlukan dalam proses pembangunan negara baik di tingkat pusat maupun daerah provinsi, kabupaten/kota, distrik dan kampung. Hal ini menuntut kesadaran dan semangat masyarakat sipil seutuhnya sebagai warga negara yang turut bertanggung jawab dalam proses pembangunan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat dipaparkan adalah sebagai berikut:

Pertama, pembangunan manusia yang merupakan bagian penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa maka perlu adanya reformasi program-program berkaitan dengan SDM. Upaya reformasi ini termasuk bentuk transformasi segala kegiatan pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia secara mearata baik secara ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Kedua, optimalisasai potensi sumber daya manusia yang prestatif, progersif dan produktif untuk masuk ke sektor-sektor strategis sebagai bentuk bagian keberlanjutan sekaligus sinergitas dalam mengelola SDM dengan baik.

Ketiga, evaluasi kinerja setiap unsur SDM di berbagai aspek yang ada untuk melakukan perubahan secara efektif dan efisisen. Evaluasi SDM merupakan bagian untuk mengukur tingkat produktivitas manusia dan progresivitas manusia dalam menghadapi kemajuan di era globalisasi.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Tahunan*, Berbagai Tahun
Penerbitan diakses Pada 27 Mei 2018.
- Badruddin, Syamsiah, *Teori dan Indikator Pembangunan*,
Jakarta: Yayasan Obor, 2009.
- Davies, A. and G. Quinlivan, *A Panel Data Analysis of the
Impact of Trade on Human Development*, Journal of
Socioeconomics, 2006.
- Dunstan, Isabel, *Indeks Pembangunan Manusia Indonesia
Meningkat tapi Kesenjangan Masih Tetap Ada*. diakses
24 Mei 2018.
- Giddens, Anthony, *The Third Way, Jalan Ketiga: Pembaharuan
Demokrasi Sosial*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
2000.
- Jakson, Robert Dan George Sorensen. *Pengantar Studi
Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2009.
- Kencana Syafiie, Inu, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta:
Rineka Cipta, 2002.
- Kumalasari, Merna, *Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Angka
Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-rata lama
sekolah, Pengeluaran Perkapita, dan Jumlah Penduduk
Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah*, Skripsi,
2011.
- Maqin, Abdul, *Indeks Pembangunan Manusia: Tinjauan Teoritis,
Empiris di Jawa Barat (Makalah Pelatihan Program
pendanaan Kompetisi Indeks Pembangunan Manusia
PPK-IPM)*, 2007.
- Miharja, Fuad Jaya, *Peran Media Pembelajaran Islam dalam
Mengembangkan Kualitas Pendidikan Nasional di Era
Global*. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan
Reformasi Pendidikan dalam Asean Economic
Community (AEC) di FKIP Universitas Jember, 2015.
- Mullis, IVS., Martin, MO., Foy, P. *TIMSS 2011 International
Results in Mathematics*. TIMSS & PIRLS International
Study Center, Lynch School of Education, Boston
College, 2011.
- Nasution, Zulkarimen, *Komunikasi Pembangunan : Pengenalan
Teori dan Penerapannya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2007.

- Sukirno, Sadono. *Beberapa Apek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1982.
- Sukma, *Islam Pembangunan*, www.wordpress.com, diakses 3 Mei 2018.
- T, Moeljarto, *Politik Pembangunan : Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1995.
- Thompson, S., Provasnik, S., Kastberg, D., Ferraro, D., Lemanski, N., Roey, S., and Jenkins, F. 2012. *Reading Achievement of U.S. Fourth-Grade Students in an International Context (NCES 2013–010 Revised)*. National Center for Education Statistics, Institute of Education Sciences, U.S. Department of Education. Washington, DC. Government Printing Office, Highlights From PIRLS 2011.
- Yudi, Alex Aldha, *Pengembangan Mutu Pendidikan Ditinjau dari Segi Sarana dan Prasarana : Sarana dan Prasarana PPLP*, Jurnal Cerdas Sifa Vol.1 Mei-Agustus 2012.